**BAB I**

**PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Meski kaum Hindu dan Muslim India telah hidup diatas tanah yang sama dan menghirup udara yang sama selama berabad-abad, serta sama-sama mengalami penjajahan Inggris selama lebih dari 150 tahun, tetapi mereka tetap memperlihatkan perbedaan komunitas, menampakan perbedaan dalam peribadatan bahkan pula dalam prinsip-prinsip kebahasaan. Kaum Hindu berbahasa Hindi dan Sanskrit dengan tulisan dari kiri ke kanan, sedangkan kaum Muslim berbahasa Urdu, Parsi dan Arab dengan tulisan dari kanan ke kiri. Segala perbedaan itu pada akhirnya menempatkan mereka pada posisi diametral, bahkan menyebabkan terjadinya fragmentasi dan permusuhan antara mereka. Sehingga, terjadilah apa yang di sebut partisi atau pemisahan antara dua komunitas Hindu dan Muslim dalam dua negara berbeda, India dan Pakistan, pada tahun 1947.

Ketika kolonial Inggris hendak meninggalkan imperiumnya di Asia Selatan tahun 1947, dua negara pewarisnya (India dan Pakistan) diharapkan oleh masyarakat dunia dapat menjalankan pemerintahan bertetangga secara damai. Kendati proses pemisahan kedua negara mengandung trauma psikis, tetapi apapun argumentasinya keduanya tetap lahir dari rahim yang sama. Apalagi petinggi kedua negara ini hakekatnya berada di bawah sosialisasi serupa (kolonial Inggris) baik dalam konsepsi pendidikan, birokrasi sipil dan militer, termasuk pula dalam etika bernegara-berpemerintah-an. Namun berbagai kesamaan tadi ternyata tak mengemuka, sedangkan trauma psikis justru yang di tonjolkan. Akibatnya, saling

curiga senantiasa menggelayut dalam pola hubungan keduanya, yang satu didominasi Hindu sementara yang lain mayoritas Muslim. Bahkan, dalam perkembangan-nya kedua negara bersaudara itu justru terjerumus dalam konflik akut, terlibat tiga kali perang terbuka disusul ratusan pertempuran kecil yang terkadang mengarah pada kemungkinan terjadinya perang keempat kalinya.

Sejarah pisahnya India-Pakistan diwarnai oleh kekerasan politik Muslim vs. Hindu-Sikh dengan korban tak kurang dari lima ratus ribu jiwa. Dalam proses pemisahan di Punjab Timur misalnya, memperlihatkan betapa tragisnya drama berdarah itu. Dimana Muslim yang minoritas di perbatasan India itu menjadi korban pembantaian massal dengan korban tewas dan luka-luka mencapai satu juta, disamping itu lebih dari satu juta dipaksa mengungsi ke Pakistan. Peristiwa tragis ini menimbulkan dendam antara dua pihak, terutama dilingkungan yang keluarganya menjadi korban, baik jiwa maupun harta. Keluarga dan anak korban tragedi 1947 itu akhirnya tersosialisasi dengan prinsip perseteruan.

Pisahnya India-Pakistan dalam praktik tak langsung tuntas, tetapi menyisakan problema semisal Kashmir. Berdirinya Pakistan adalah keinginan masyarakat Muslim India untuk mendirikan negara sendiri, terpisah dari mayoritas Hindu yang mendominasi. Ketika pemisahan berlangsung, mayoritas *Princely State* (negara kepangeranan) sub kontinen India yang berjumlah 562, secara alamiah dapat merasa kemana dirinya akan bergabung: India atau Pakistan. Namun, ada tiga wilayah (Junagadh, Hyderabad, dan Jammu-Kashmir) yang sulit menentukan pilihan mengingat di ketigannya antara agama penguasa dengan agama mayoritas penduduk tidak segaris. Ketidakjelasan atas kepastian sikap itu bahkan berlanjut sampai ketika kedua negara terbentuk: Pakistan (14 Agustus 1947) dan India (15 Agustus 1947). Hyderabad dan Junagad (penguasa Muslim tetapi penduduk Hindu) berhasil di selesaikan dengan paksa oleh pemerintahan New Delhi agar masuk menjadi bagian India, sedangkan Jammu-Kashmir (penguasa Hindu dengan penduduk Muslim) gagal menjadi bagian Islamabad terutama akibat campur tangan New Delhi yang memberi sokongan pada penguasa Hindu di Jammu-Kashmir, Harry Singh.

Problema Kashmir bermula ketika masyarakat Muslim di anak benua India membangun negara sendiri, Pakistan, lepas dari India yang didominasi oleh Hindu, pada tahun 1947. berbagai wilayah yang didominasi Muslim menggabungkan diri dalam Pakistan, sedang daerah yang mayoritas non-Muslim tercakup dalam negara India. Namun persoalan muncul terkait dengan wilayah Kashmir yang penduduknya mayoritas Muslim, tetapi pimpinanya seorang Hindu.

Bagi Islamabad dasar berdirinya Pakistan adalah keinginan masyarakat Muslim untuk membangun negara sendiri terpisah dari kaum Hindu. Oleh karena itu logikanya jelas bahwa Kashmir yang penduduknya lebih dari 77 persen Muslim seharusnya menjadi bagian dari Pakistan. Tetapi, New Delhi berpikiran lain bahwa pemimpin Kashmir yang Hindu, Harry Singh, telah menggabungkan Kashmir ke dalam negara India, kendati tanpa persetujuan rakyatnya. Sikap Harry Singh inilah yang akhirnya menempatkan Kashmir sebagai wilayah perebutan yang sampai kini terkoyak, menjadi wilayah sengketa tak terselesaikan.

Jika tahun 1947 bagi India dan Pakistan menjadi tanda bagi hari kemerdekaan mereka, maka bagi Kashmir tahun 1947 justru menandai awal petaka, tongggak keterperangkapan mereka dalam kerangkeng nestapa dan penjajahan yang tak ada batasannya. Penyiksaan, perkosaan, pembunuhan, dan perampasan serta pembakaran hak milik, dari waktu ke waktu selalu mewarnai spektrum kehidupan masyarakat Kashmir India. Data dari *Amnesty Internasional* (London) dan *Asia Watch* (New York-Washington) misalnya menyebutkan, sejak 1990 sampai 1999 saja, sekitar 71.204 rakyat Kashmir telah tewas dibunuh aparat India. Jumlah ini belum termasuk yang terluka mencapai 29.561, serta berbagai kerusakan harta benda. Hal yang tak kalah tragis, terdapat 7.613 wanita telah menjadi korban perkosaan.[[1]](#footnote-1)1

Ada beberapa isu yang sering kali menjadi pemicu ketegangan diantara kedua negara tersebut (India-Pakistan), diantaranya (1). Persaingan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam konstelasi regional, (2). Politik diskriminasi penguasa dan atau mayoritas masyarakat Hindu India terhadap minoritas Muslim, yang mana sering menimbulkan gerakan solidaritas umat di lingkungan rakyat Pakistan.

Dibanding dua isu utama tadi, persoalan Kashmir tetap merupakan faktor yang paling menjerumuskan kedua negara dalam perseteruan diplomatik dan konflik bersenjata. Bahkan, faktor Kashmir pula menjadi pertimbangan penting bagi India-Pakistan untuk mengembangkan senjata nuklir, yang pada gilirannya memancing perhatian dunia internasional, khususnya dunia barat, untuk segera terlibat secara signifikan. Tentu saja kiprah barat ini bukan karena pertimbangan kemanusiaan atas problema rakyat Kashmir, melainkan lebih diakibatkan oleh kalkulasi barat atas (terancamnya hegemoni) nuklir mereka.

Konflik Kashmir pada akhirnya memaksa India dan Pakistan menoleh pada senjata pamungkas, nuklir. Keduanya secara diam-diam, dan kemudian terang-terangan, berlomba mengembangkan dan membuat bom atom atau rudal jelajah berhulu ledak nuklir. Rudal-rudal yang diuji pun semakin canggih, semakin jauh daya jelajahnya hingga mampu menjangkau semua kota lawan. Kalau sudah demikian, masing-masing merasa paling hebat dan lupa diri untuk mencoba mencari formula damai. Meskipun senjata nuklir pada era Perang Dingin lalu terbukti hanya menjadi faktor *deterrent*, dalam kasus India-Pakistan tidak tertutup kemungkinan senjata pemusnah massal bakal digunakan.

Bahkan, India dan Pakistan yang berseteru itu kini telah memperkuat diri dengan kekuatan nuklir, serta telah sama-sama telah melancarkan 6 kali uji coba nuklir. New Delhi diperkirakan memiliki 50-60 kepala nuklir, sedangkan Islamabad mempunyai 12-18 hulu ledak nuklir. Sebenarnya, pasca perang dingin, atmosfer Internasional memperlihatkan “kompetisi perlucutan senjata” seperti terwujud dalam kesepakatan AS-Rusia untuk mengurangi arsenal nuklir sampai duapertiga nuklir yang mereka miliki. Namun fenomena ini tak berpengaruh pada perseteruan perbatasan India-Pakistan maupun pada kompetisi nuklir kedua negara. Dengan kata lain, tampaknya persoaalan nuklir India – Pakistan sifatnya independen, dalam arti tak terkait dengan konflik politik perang dingin, sehingga kendati perang dingin telah berakhir, nuklirisasi bukannya ikut berhenti, melainkan justru mengakumulasi.

Politik nuklir sering digambarkan dalam konfigurasi politik yang sederhana yaitu hanya lima negara yang memiliki daya tempur nuklir. Namun dengan berakhirnya perang dingin beberapa negara berlomba mempersenjatai diri mereka dengan nuklir. Perhatian politik nuklir dunia hanya tertuju pada kawasan panas seperti Timur Tengah dan Timur Jauh dimana pada kawasan tersebut tingkat aancaman konflik nuklir tingkat tinggi dengan adanya Israel, Irak, Iran dan Libya di Timur Tengah dan Korea Utara serta Cina di kawasan Timur Jauh.

Munculnya ambisi nuklir Pakistan sebenarnya telah ada sejak lama, seperti dikemukakan oleh Ali Bhutto tahun 1965, ”kita harus membangun sebuah bom atom, bahkan meski kita harus makan rumput, daun, atau harus berlapar-lapar. Karena tak ada senjata konvensional alternatif kecuali bom atom”. Memang pada saat itu persoalan nuklir Pakistan masih dalam tahap retorika politik. Bahkan sampai tahun 1974 pakistan sepertinya tidak terlalu serius untuk membuat senjata nuklir. Namun pada awal 1980 an program itu telah mengarah ke tahap serius, sesuai dengan misi pemimpin Pakistan kala itu, Jendral Zia Ul Haq, yang dalam konstelasi hubungan India-Pakistan menerapkan strategi paritas, kekerasan akan dibalas dengan kekerasan.

Untuk India sendiri pengembangan nuklir sebenarnya telah dirintis sejak 1945, namun baru berhasil di ujicobakan pada 18 Mei 1974, era pemerintahan Indira Gandhi. Memang, kala itu Indira Gandhi berargumentasi bahwa uji coba nuklir yang berkekuatan 10 kiloton di gurun pasir Pikhran merupakan ledakan nuklir damai *(peacefull explosion)* guna menghasilkan pengembangan energi nuklir, bukan untuk senjata nuklir. Namun, faktor kalkulasi penangkalan terhadap kekuatan militer Cina tampaknya tidak dapat diingkari.

India yang mengadakan uji coba nuklir yang pertama pada tahun 1974 menjadi kurang diperhatikan padahal tingkat eskalasi ancaman nuklir di kawasan ini meningkat dengan adanya masalah Kashmir (Pakistan) dan perseteruan India dengan Cina. Masalah keamanan menjadi isu paling rawan dengan belum terciftanya perdamaian di kawasan ini.

Selain gara-gara masalah perbatasan, urusan adu pengembangan arsenal nuklir memang jadi pemicu lain ketegangan India-Pakistan. Tak hanya melenggang sendiri-sendiri, keduanya juga memanfaatkan campur tangan teknologi asing dalam pengembangan arsenal nuklir. India, misalnya, untuk membuat rudal balistik memanfaatkan kecerdasan ahli Rusia saat negeri ini mengakuisisi rudal SA-2 *Guidline*. Sedangkan Pakistan sampai sekarang masih menggandeng Cina (tipe M11/9) dan Korea Utara (*No-Dong 1*) dalam pengembangan rudal balistiknya. Sejak 1998, kedua negara tergolong berkemampuan nuklir setelah melakukan uji coba dan makin meramaikan bursa nuklir dunia yang sudah mencapai 30.000 arsenal nuklir.[[2]](#footnote-2)2

Dari hasil analisa pakar pertahanan *Jane's Defence Weekly* tahun lalu, setidaknya Pakistan memiliki 150 unit nuklir. Jumlah ini lebih sedikit dibanding India yang memiliki 200 hingga 250 unit. Namun begitu, jumlah ini masih terus menjadi tanda tanya soal tingkat keakuratannya. Karena tidak satupun negara berkekuatan nuklir maupun negara yang tergolong dalam kategori berkemampuan nuklir, mau mengungkapkan kekuatannya secara gamblang.

Problematiknya serta amat kompleksnya hubungan India-Pakistan terutama dalam konflik Kashmir yang merupakan problema tertua dalam agenda badan dunia PBB yang tetap terbengkalai hingga kini, apalagi setelah dikembangkannya senjata nuklir oleh kedua negara berseteru, akhirnya menjadi sedemikian menarik bagi penulis untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul : **“KONFLIK KASHMIR DAN KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN NUKLIR ANTARA INDIA DENGAN PAKISTAN”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Situasi kawasan Asia Selatan merasa terancam dengan adanya konflik antara India-Pakistan. Dimana konflik yang diawali dengan permasalahan Kashmir yang memiliki akar panjang dalam percaturan global. Sejarah mencatat, kendati Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menelurkan resolusi dalam persoalan yang sama (1948), namun sampai setengah abad berikutnya masalah Kashmir tetap belum terselesaikan. Dan implikasinya terhadap masalah intern kedua negara tersebut, terutama dalam rivalitas nuklirnya.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas dan untuk mempermudah penelitian, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik Kashmir?
2. Bagaimana dampak konflik Kashmir dapat berpengaruh terhadap persaingan atau eskalasi Nuklir India dan Pakistan serta apa saja indikator yang memicu timbulnya konflik tersebut?
3. Bagaimana peta kekuatan India dan Pakistan khususnya dalam persaingan nuklir kedua negara yang menyebabkan konflik mereka tak kunjung reda sampai sekarang?
4. Bagaimana kemungkinan indikasi-indikasi mengenai Eskalasi Nuklir India dan Pakistan di masa yang akan datang?

**1. Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini nampak bahwa permasalahan yang akan diteliti begitu luas dan kompleks, untuk itu penulis membatasi pada seputar permasalahan yang menyangkut konflik Kashmir dan implikasinya terhadap adanya peningkatan peta kekuatan India-Pakistan terutama Rivalitas nuklirnya didalam konflik India-Pakistan. ( Oktober 1947 – April 1998)

**2. Perumusan Masalah**

Untuk memudahkan dalam penganalisaan permasalahan diatas, berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk *research problem* yaitu, sebagai berikut:

***“Bagaimana konflik Kashmir dapat berpengaruh terhadap peta kekuatan India-Pakistan khususnya dalam peningkatan senjata nuklir?”***

# C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

**1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi terjadinya permasalahan Kashmir dan pengaruhnya terhadap hubungan India-Pakistan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan data yang akurat tentang peta kekuatan India-Pakistan yang mengarah pada peningkatan konflik mereka dengan adanya permasalahan Kashmir dan rivalitas senjata nuklir dan pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Selatan.
3. Mengingat masalah pengembangan nuklir masih sangat relevan dengan konflik yang terjadi di sub-kontinen yang berpengaruh terhadap kestabilan keamanan di kawasan Asia Selatan, dan dengan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan ini sehingga perlu untuk mengikuti perkembangan masalah ini secara cermat.
4. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan yang ditimbulkan oleh India dan Pakistan dimasa mendatang dan seperti apa implikasinya bagi kawasan Asia Selatan. Sekaligus untuk menganalisis dan memprediksi bagaimana prospek stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Selatan.

**2. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah wawasan penulis mengenai permasalahan Kashmir dan konflik antara India dengan Pakistan.
2. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek yang saling berkaitan dalam realita berbagai peristiwa masalah dan fenomena internasional.
3. Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang Hubungan Internasional khususnya mengenai Politik Luar Negeri suatu negara, dan di harapkan menjadi tulisan yang bersifat komperatif bagi tulisan yang serupa, dan menjadi bahan referensi tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional.
4. Untuk melatih penulis didalam menggunakan metode dan teknik penelitian serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh ke dalam fenomena yang menjadi realitas untuk menambah ketajaman dalam menganalisa suatu permasalahan berdasarkan teori-teori yang relevan.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Strata Satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

**D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

**1. Kerangka Pemikiran**

Dalam mengangkat fenomena-fenomena yang ada dan terjadi dalam Hubungan Internasional, penulis akan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai saran penopang dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian.

Adapun beberapa teori dan konsep yang di bahas ini menggunakan premis mayor dan premis minor, yang merupakan teori umum dan teori khusus sehingga alur pembahasan terlihat seperti piramida terbalik yang dimulai dengan pembahasan teori-teori umum dan berakhir dengan teori-teori yang bersifat khusus.

Perlu diketahui bahwa bentuk hubungan baik yang dilakukan individu atau kelompok yang melintasi batas-batas teretorial negara (hubungan antara satu negara dengan negara lain) atau semua interaksi yang melibatkan lebih dari satu negara atau bangsa dapat dikatakan sebagai **“Hubungan Internasional”**. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat **Suwardi Wiraatmadja**, dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional* sebagai berikut:

**“Hubungan Internasional merupakan Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dalam politik internasional dan merupakan sebuah aspek internasional dari kehidupan social dalam arti tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lainnya.”**[[3]](#footnote-3)3

Konsep lain mengenai Hubungan Internasional yakni dari **K.J. Holsty** dalam bukunya *Politik Internasional Sebagai Suatu Kerangka Analisis* menyebutkan bahwa “Hubungan Internasional” sebagai berikut:

**“Berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan antara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, organisasi internasional, palang merah internasional, parawisata, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”**[[4]](#footnote-4)4

Hubungan Internasional tidak terlepas dari politik internasional. **Dahlan Nasution** menggambarkan politik internasional sebagai berikut:

**“Politik Internasionl merupakan suatu tindakan negara dengan beberapa negara yang di tunjukan pada suatu negara atau negara lainnya dan sifatnya lebih di tekankan pada soal-soal politik masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara tersebut.”**[[5]](#footnote-5)5

Dalam mencapai sasaran nilai-nilai yang terdapat didalam negaranya, setiap negara akan berusaha melakukan kegiatan yang berorientasi keluar wilayah dalam rangka hubungan luar negeri dan memerlukan instrumen yang di sebut politik internasional. Orientasi keluar wilayah tersebut bisa berupa respon, tindakan, persepsi, nilai-nilai maupun komitmen negara tersebut terhadap negara lainnya yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi domestik dan internasional.

Gambaran suatu kompleksitas dengan keragaman faktor baik aspek negara sebagai aspek yang paling penting dalam masyarakat internasional yang menjadi suatu unit sebagai pelaku dalam system dan memiliki peran yang sangat dominan walau aspek lain tidak bisa di abaikan, tetapi perilaku suatu negara tidak bisa lepas dari lingkungan yang lebih besar yang berada di luar negara itu yang tindakannya di sebut politik luar negeri. Adapun ungkapan tentang politik luar negeri menurut **Jack C. Plano** dan **Roy Olton** sebagai berikut:

**“Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan dan suatu negara dalam menghadapi negar lain atau unit politik internasional lainnya, dan di kendalikan untuk mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh inisiatif atau sebagai suatu reaksi terhadap inisiatif yang dilakukan oleh negara lain.”**[[6]](#footnote-6)6

Disini akan terlihat adanya suatu kepentingan nasional yang dimanifestasikan dengan kebijakan Luar negeri yang semakin memiliki nilai absah, dan di pengaruhi kondisi internal maupun kondisi eksternal Luar Negeri dan akan memasuki kawasan dan ruang lingkup kajian Study Kawasan. Pengertian Study Kawasan diberikan oleh **Theodore A Coloumbis** dan **James H** **Wolfe**, dalam bukunya Pengantar Hubungan Internasional, yaitu:

**“Study Kawasan adalah mengenai kawasan berdasarkan luas wilayah seperti Asia, Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Selatan, dan Oceania. Berikut ini adalah kriteria yang paling umum digunakan untuk mengelompokan negara-negara dalam kawasan:**

* **Kriteria geografis: mengelompokan negara-negara berdasarkan lokasinya benua, sub benua, kepulauan dan lain-lain.**
* **Kriteria Politik dan Militer: mengelompokan negara-negara berdasarkan ke-ikut sertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan orientasi ideologis politik misalnya : Faktawarsawa, Blok Komunis, NATO, dan Dunia ketiga.**
* **Kriteria ekonomi: mengelompokan negara-negara berdasarkan kriteria-kriteria terpilih mengenai perkembangan.**
* **Kriteria Transaksional: mengelompokan negara-negara berdasarkan, jumlah dan frekuensi pertukaran penduduk, barang-barang, jasa-jasa, seperti para imigran, para turis, perdagangan dan berita-berita.”**[[7]](#footnote-7)7 **(1990 : 312 – 313)**

Definisi Study Kawasan memberikan alternatif dalam pembahasan dapat dilihat dari kriteria geografis, politik dan militer, ekonomi, transaksional.

Hubungan Kawasan dapat diartikan pula Regionalism (hubungan antar kawasan), **Jack C Plano** dan **Roy olton** dalam *Kamus Hubungan Internasional* yang telah diterjemahkan oleh **Wawan Juanda**, menyatakan sebagai berikut:

**“Konsep mengenai bangsa yang terdapat dikawasan geografis tertentu atau bangsa yang memiliki hirauan bersama dapat bekerjasama melalui organisasi dengan keanggotaan terbatas untuk mengatasi masalah fungsional, militer, dan politik.”**[[8]](#footnote-8)8

Dengan adanya berbagai macam aspek yang mempunyai kepentingan bersama tersebut, hadir dan terwujudnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri mempunyai peranan khusus sebagai pemahaman dari apa yang terdapat dalam suatu kawasan, sebagaimana menurut **Leonard, L.L**, dalam bukunya *International Organization*, di ungkapkan sebagai berikut:

**“International Organization has come to have special meaning and characteristic : it is the method of conducting international relations by means of fairly permanent agencies to wich the member states have assigned responsibilities and authority and trough which each government may advocat policies and objectivies in furtherance of its national interns.”**[[9]](#footnote-9)9

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam peranannya mempunyai sub-atau bagian organisasi khusus yang menangani permasalahan atau konflik yang terjadi pada suatu negara atau wilayah yang bersengketa. Salah satunya yaitu Dewan Keamanan PBB yang menangani masalah keamanan dan perdamaian, sebagaimana menurut **Jack C Plano** dan **Roy Olton** dalam *Kamus Hubungan* *Internasional*, yang di terjemahkan oleh **Wawan Juanda**. Memberikan suatu signifikasi tentang Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Security Council*) sebagai berikut:

**“Berdasarkan Piagam PBB, peran pemeliharaan perdamaian Dewan Keamanan disandang untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai (Bab IV), atau, atau mengikuti ketentuan bahwa telah jadi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau terjadi tindakan agresi, maka dewan dapat menghimbau negara anggota untuk melakukan tindakan kolektif terhadap negara yang melanggar perdamaian (Bab VII).”**[[10]](#footnote-10)10

Dengan dibutuhkan suatu peranan dan upaya diplomatik dalam permasalahan Kashmir dan konflik India-Pakistan, setidaknya apa yang di cita-citakan oleh Dewan Keamanan PBB tersebut akan terwujud dan ter-realisasikan adapun bentuk dan wujud dari yang telah dilakukan melalui peranan tersebut diantaranya yaitu terjaganya suatu Stabilitas Internasional.

Arti dari stabilitas itu sendiri, menurut **Jack C Plano**:

**“Suatu kondisi dari sebuah system yang komponennya cenderung tetap didalam, kembali kepada hubungan yang telah mantap, stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau didalam suatu system politik, atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah di sepakati atau ditentukan.”** [[11]](#footnote-11)11

Menurut **Dahlan Nasution** dalam bukunya *Politik Internasional* konflik adalah sebagai berikut:

**“Konflik merupakan persaingan, apakah lugas, semu, atau masih berupa sesuatu yang bersifat potensi, adalah suatu hal yang normal dalam hubungan antar negara kebangsaan. Sumber konflik terletak dalam hubungan antar sistem-sistem Negara kebangsaan itu sendiri yang dilandasi oleh konsep egosentrisme, yaitu aspirasi serta kedudukan Negara dalam hubungan dengan Negara lain”**[[12]](#footnote-12)12

Dengan demikian konflik pada umumnya disebabkan oleh pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau mempertahankan wilayah teretorial, keamanan, semangat, jalur kemudahan menuju daerah pemasaran, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintahan negara yang tidak bersahabat, dan lain-lain. Dalam usaha untuk mempertahankan tujuan tersebut, tuntutan, tindakan atau keduanya akan berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan Negara lain.

konflik Kashmir yang merupakan problema tertua dalam agenda badan dunia PBB yang tetap terbengkalai hingga kini, dan telah menjadi pemicu munculnya konflik India-Pakistan. Sementara itu ditemukan definisi dari konflik menurut **K.J. Holsti** sebagai berikut:

**“Konflik adalah suatu tindakan yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang direncanakan dengan baik, timbul dari perpaduan berbagai sebab seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap permusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatic tertentu…konflik tersebut biasanya disebabkan pertentangan pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau mempertahankan wilayah teretorial, keamanan…perilaku konflik merupakan pertentangan antara tuntutan yang dimiliki oleh suatu negara dengan kepentingan negara lain.”**[[13]](#footnote-13)13

Menurut **Dahlan Nasution** tentang konflik internasional:

**“Konflik internasional merupakan masalah yang tidak dapat dihindarkan dalam politik internasional. Sumber konflik terletak pada, hubungan antar negara yag dilandasi oleh konsep kepentingan nasional dari masing-masing negara, kepentingan nasional merupakan unsur yang menjadi kebutuhan penting bagi negara, unsur ini mencakup berlangsungnya hidup bangsa, kemerdekaan keutuhan keamanan wilayah militer dan kesehjateraan ekonomi.”**[[14]](#footnote-14)14

Begitupun dengan konflik yang bersifat histories seperti konflik India-Pakistan yang mengalami pasang surut sejak tahun 1947.

**“India-Pakistan rutin terlibat bentrokan diperbatasan Kashmir. Kedua negara bertetangga di Asia Selatan ini, yang masing-masing menguasai teknologi senjata nuklir, bersengketa soal wilayah Kashmir dipegunungan Himalaya. Sekurangnya dua negara ini telah terlibat dalam tiga perang sejak kemerdekaan mereka dari Inggris tahun 1947-dua diantaranya menyangkut masalah Kashmir.”**[[15]](#footnote-15)15

**Musharraf** juga mengatakan:

**“Sengketa Kashmir menjadi batu penghalang utama terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian yang abadi di Asia Selatan dengan menambahkan, masyarakat internasional telah menyadari bahwa stabilitas regional hanya dapat terjamin atas penyelesaian atas masalah ini.”**[[16]](#footnote-16)16

Dan juga menurut **Hery Sucipto** dalam catatanya *Benang Kusut Kashmir* pada harian Kompas 2001, meminjam pendapat **Marrio E Carranza** sebagai berikut:

**“Sejak berakhirnya perang ketiga tahun 1971, hubungan kedua negara yang lahir dari rahim yang sama ini dapat digolongkan kedalam empat Susana: suasana détente 1972-1979; suasana saling mendekati melalui sejumlah pertemuan bilateral tahun 1980-an; kondisi terbaik dari berlanjutnya diplomasi kerjasama India-Pakistan diluar persoalan Kashmir, ditandai eksisnya kerjasama regional Asia Selatan tahun 1985; serta penandatanganan hot line agreement untuk tak saling menyerang instalasi nuklir India-Pakistan.”**[[17]](#footnote-17)17

Seperti yang telah disebutkan diatas, timbulnya konflik akan menimbulkan pula suatu pakta atau perjanjian yang akan mengikat kedua negara yang bersengketa untuk saling intropeksi ataupun saling mengevaluasi mengapa dan bagaimana konflik itu bisa terjadi dan bentuk solusi apa yang dapat menyelesaikannya. Untuk itu **Ilham Gunawan** dalam bukunya *Kamus Politik* *Internasional* men-deskriptikan sebagai berikut:

**“Pakta India-Pakistan: Perjanjian keamanan antara India-Pakistan menyebutkan masalah yang:**

1. **Untuk memperoleh jaminan kedua belah pihak bahwa masing-masing tindakan menggunakan kekerasan kekuatan atau invansi.**
2. **Untuk mencapai persetujuan bahwa kedua belah pihak akan menempuh cara damai untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian diantara mereka.”**[[18]](#footnote-18)18

Sebagai instrumen kebijakan nasional, perseenjataan merupakan salah satu ciri penting. Gunanya ialah untuk mencapai atau mempertahankan tujuan nasional atau mempengaruhi orientasi politik luar negeri, peranan nasional, sasaran dan tindakan negara lain.

Kekuatan militer (force) dan ancaman pemakaian kekuatan telah menjadi bagian dari hubungan internasional, dan perkembangan teknologi militer sering memberi pengaruh penting terhadap tatanan dan proses politik. Senjata termonuklir dan sistem peluncuran peluru kendali jarak jauh, tidak secara kuantitatif berbeda dengan system persenjataan sebelumnya, tetapi juga secara kualitatif.

Untuk menjelaskan permasalahan diatas penulis juga menggunakan teori *preponderant power,* yang dikuatkan oleh **Charles P. Schleicher**. “…peace is most jeopardy when power is rather evenly balanced and war is likely when there is a preponderant power…”[[19]](#footnote-19)19

Teori *preponderant power* Charles P. Schleicher menyarankan adanya suatu kekuatan yang jauh mengungguli yang lainnya (preponderant power) dimana dengan adanya kekuatan tersebut perdamaian dapat terjaga, dan sebaliknya perang dapat terjadi jikalau kekuatan terbagi lebih kurang seimbang.

Dengan hadirnya nuklir dalam setiap pertahanan dan keamanan suatu negara, timbulah gejala beru dalam sistem Internasional. Kehadiran nuklir dalam sistem internasional telah jauh mengurangi kemungkinan perang antar negara.

Peranan senjata nuklir tidaklah melulu dipertimbangkan dari segi militer belaka, akan tetapi juga konteks politik bangsa-bangsa yang bersangkutan.

India dengan pengembangan nuklirnya, dalam hal ini jauh mengungguli negara-negara lainnya di kawasan Asia Selatan, dimana negara-negara tersebut mempunyai persepsi ancaaman yang berbeda-beda terhadap India, khususnya Pakistan.

Memang dalam hal sejata, India-Pakistan merupakan dua negara yang terus menerus mengembangkan kemampuan dibidang pernukliran mereka, namun sejauh menyangkut ancaman luar, sebenarnya ada hal yang mendasar yang tidak berubah, system persenjataan nuklir menurut **Kusnanto Anggoro**, seperti berikut: **“Sistem persenjataan, nuklir maupun non-nuklir, dianggap sebagai suatu instrumen untuk mencapai tujuan politik tertentu seiring dengan semakin meluasnya aspek politik dari keamanan”**

Perlombaan senjata nuklir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

**“Perlombaan senjata nuklir di suatu kawasan Regional dapat di picu oleh beberapa faktor, ketidak amanan wilayah, kompetisi untuk meningkatkan status dikawasan regionalnya dan masalah Modernisasi berpengaruh terhadap perlombaan pengembangan senjata nuklir.”**[[20]](#footnote-20)20

Dengan perlombaan senjata nuklir yang urung berhenti akan semakin meningkatnya konflik kedua negara atom tersebut (India-Pakistan). Hingga konsekuensi tidak akan berpengaruh, demi prestise negara mereka ataupun kepentingan-kepentingan politik mereka.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, antara India Pakistan telah terjadi suatu hubungan konflik yang berkembang terus, seperti yang dikemukakan oleh **Dougherty** dan **Pfalzgraff** seprti yang dikutip oleh **Edy Prasetyo** dalam analisis CSIS No. 5 bahwa:

**“perbedaan dan persamaan diantara masyarakat dapat menjadikan konflik yang sensitive, seperti konflik antara India-Pakistan yang didasari banyak hal. Kecenderungan yang terjadi mengarahkan kepada perlombaan senjata dimana kedua negara cenderung meningkatkan kekuatan persenjataan dan melakukan persenjataannya dalam bentuk uji coba nuklir.”**[[21]](#footnote-21)21

Adapun pengertian mengenai senjata nuklir menurut *Naskah Piagam PBB* tentang persenjataan dan pelucutan senjata sebagai berikut:

**“Suatu senjata yang menghasilkan energi yang sangat besar yang berasal dari reaksi berantai atau penggabungan inti atom, serta berdaya rusak jauh lebih besar dari pada senjata konvensional karena menimbulkan gelombang udara dan ledakan, panas, api, serta radiasi seketika dan radiasi susulan, atau bisa dikatakan bahwa nuklir adalah senjata yang mengandung prinsip-prinsip penggabungan (fusi) untuk menghancurkan sasaran.”**

Dan untuk menempuh penyelesaian konflik itu sendiri sebenarnya sudah tercatat dalam suatu kesepakatan bersama antara India dengan Pakistan sebagaimana bunyi dari resolusi DK-PBB atau tepatnya resolusi komisi PBB bagi India-Pakistan (UNCIP) tanggal 13 Agustus 1948, dalam bukunya **Jubaidi Pribadi** yang berjudul *Kashmir dan Peran PBB*, menyebutkan sebagai berikut:

**“Pemerintah India dan Pakistan menegaskan kembali keinginan meraka bahwa status masa depan negara Jammu dan Kashmir akan ditentukan sesuai dengan kehendak rakyat dan untuk mencapai tujuan tersebut, atas penerimaan perjanjian gencatan senjata, kedua pemerintah setuju untuk memasuki konsultasi-konsultasi dengan komisi tersebut untuk menentukan syarat-syarat yang adil dan seimbang dimana pernyataan bebas itu terjamin.”**[[22]](#footnote-22)22

Masih dalam buku yang sama **(jubaidi Pribadi)**, selanjutnya resolusi UNCIP tanggal 5 Januari 1949 menyebutkan:

**“Setelah menerima perintah dari India dan Pakistan masing-masing dalam komunikasi 24 Desember dan 25 Desember 1948, penerimaan mereka atas prinsip-prinsip berikut yang merupakan tambahan pada resolusi 13 Agustus 1948, masalah aksesi (penggabungan) negara Jammu dan Kashmir kepada India atau Pakistan akan ditentukan melalui cara demokratis dari suatu plebisit yang bebas dan tidak memihak.”**[[23]](#footnote-23)23

Konflik India-Pakistan ini merupakan bagian dari trauma dan kepedihan yang dialami pada masa lampau, sering diremehkan: seperti pengalaman pribadi dan kolektif tentang kepedihan, kehilangan, dan mungkin kekerasan. Ini sering kali menjadi penghalang dalam menangani konflik.

Dalam menanggapi situasi ini, lebih banyak penelitian dan usaha praktis yang dilakukan untuk mengurangi konflik yang keras. Untuk itu, **Simon Fisher**, **Jawed Ludin**, **Steve Williams**, **Deka Ibrahim Abdi**, ***Richard Smith***, **Sue Williams**, dalam bukunya yang telah dialih bahasakan berjudul *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk bertindak* yang telah dialih bahasa oleh **SN Kartikasari**, **Mieske D D. Tapilatu**, **Rita Maharani**, **Dwiati Novita Rini**, menyimpulkan: *Teori Transfomasi Konflik* berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan muncul sebagai masalah sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai Teori ini adalah:[[24]](#footnote-24)24

1. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
2. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang menjalankan konflik.
3. Mengembangkan berbagai proses dan system untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan.

Demikian kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam membantu proses penelitian sehingga dapat memberikan jawaban yang valid, argumentative, dan dapat memberikan objektifitas dalam penelitian.

Berdasarkan beberapa teori dari para pakar ahli mengenai Hubungan Intenasional, maka penulis berasumsi bahwa suatu konflik yang terjadi antar negara/kawasan tidak lepas akan pengaruh dan campur tangan negara lain yang semuanya mendasari Politik Dalam Negeri maupun Politik Luar Negeri suatu negara. Dan dapat ditarik konklusi bahwa Hubungan Internasional mempunyai cakupan yang sangat luas dan tidak hanya menyangkut hubungan politik secara langsung antara negara di dalam suatu sistem internasional tetapi mempunyai aspek-aspek yang sangat luas.

**2. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, penulis dapat menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

“Karena Konflik Kashmir Mengenai persengketaan perbatasan antara India-Pakistan tidak kunjung terselesaikan maka hal tersebut menyebabkan ketegangan antara India-Pakistan yang menimbulkan eskalasi peta kekuatan nuklir antara kedua negara tersebut”.

**3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik dan Analisis)**

Dari hipotesis diatas, dapat ditarik variabel bebas dan variabel terkait yang selanjutnya akan dipakai dalam verifikasi atau pembuktian hipotesis dengan menggunakan tolok ukur berdasarkan konsep teoritik, konsep empirik dan konsep analisis yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik**) | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis**) |
| Variabel Bebas:  Konflik Kashmir tentang persengketaan perbatasan India-Pakistan. | 1. Proses dekolonisasi dan pratisi India 2. Adanya pemisahan Wilayah India kedalam dua Negara, India-Pakistan 3. Adanya isu perebutan wilayah (Kashmir) yang melibatkan India-Pakistan | 1. Data (fakta dan angka) mengenai Proses dekolonisasi dan pratisi India 2. Data (fakta dan angka) mengenai pemisahan Wilayah India kedalam dua Negara, India-Pakistan 3. Data (fakta dan angka) mengenai isu perebutan wilayah (Kashmir) yang melibatkan India-Pakistan |
| Variabel Terkait:  eskalasi peta kekuatan nuklir India-Pakistan. | 1. Perlombaan senjata India-Pakistan terutama dalam hal nuklir | 1. Data (fakta dan angka) mengenai Perlombaan senjata India-Pakistan terutama dalam hal nuklir |

**4. Skema Kerangka Teoritik**

Dekolonisasi dan Pratisi India

India

Pakistan

Kashmir

Konflik Kashmir antara India-Pakistan

Pengembangan nuklir India

Pengembangan nuklir Pakistan

Eskalasi nuklir India-Pakistan

**E. Metode Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data**

1. **Tingkat Analisis**

Penggunaan tingkat analisa dalam studi Hubungan Internasional penting dilakukan untuk memudahkan memilah-milah masalah yang paling layak digunakan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodologis yang disebut *fallacy of composition* dan *ecological fallacy*.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan tingkat analisa korelasionis. Hal ini didapat setelah menyaring variabel independen dan dependennya. Variabel independen (Konflik Kashmir) yang merupakan unit eksplanasi mengarah pada Negara-Bangsa, dan variabel dependen (Peningkatan peta kekuatan India-Pakistan terutama didalam Rivalitas nuklirnya) yang merupakan unit analisis mengarah pada Negara-Bangsa.

Mengacu pada matriks yang dibuat oleh Moechtar Mas’oed, maka penulis menggunakan tingkat analisa korelasionis.

**2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Metode *Deskriptif*, penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang aktual melalui cara pengumpulan data, kemudian mengklasifikasikannya dan menganalisis data tersebut guna memecahkan permasalahan. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran-gambaran secara sistematis, factual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serata hubungan antara fenomena yang diselidiki. Peneliti mencoba memaparkan permasalahan Kashmir dan kaitannya dengan rivalitas nuklir antara India dengan Pakistan.

**2.** **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam membahas skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

*Studi Kepustakaan*, yaitu usaha mencari data dan pengumpulan data serta informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi, baik yang bersumber dari buku, majalah, harian umum, artikel maupun catatan penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

**F. Lokasi Penelitian dan lamanya Penelitian**

1. **Lokasi Penelitian** 
   1. Center For Strategic International Studies (CSIS)

Jl. Tanah Abang III No 23-27, Jakarta

* 1. United Nations Information Centre (UNIC)

Gedung Suryalaya Lt. 14, Jl. Tamrin kav 9, Jakarta

* 1. Pusat Informasi Kompas

Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta

* + 1. Kedutaan India (Embassy of The Republik of India)

Jl. HR Rasuna Said Kav. S-1, Kuningan, Jakarta 12950

* + 1. Kedutaan Pakistan (Embassy of The Islamic Republic of Pakistan)

Jl. Teuku Umar No. 50, Menteng, Jakarta 10350

1. **Lamanya Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama lebih kurang enam bulan, yaitu dimulai dari bulan Juni 2005 sampai bulan November 2005.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan  Kegiatan | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November |
| Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |
| Bimbingan dan Penelitian |  |  |  |  |  |  |
| Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |
| Bimbingan dan Penelitian |  |  |  |  |  |  |
| Seminar Draft |  |  |  |  |  |  |
| Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |  |

Keterangan: Tabel Jadwal Penelitian Skripsi

1. 1 Dhurorudin Mashad,*Kashmir Derita yang Tak Kunjung Usai,*April 2004,hlm.3. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 <http://www.Google.com>., diakses juli 2005. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Suwardi Wiraatmadja, *Pengantar Hubungan Internasional* (1970), hlm.1. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 K.J.Holsty,*Politik Internasional sebagai suatu Kerangka Analisis* (1987),hlm.33. [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 Dahlan Nasution,*Politik Internasional* (1990),hlm.123. [↑](#footnote-ref-5)
6. 6 Jack C. Plano dan Roy Olton *Kamus Hubungan Internasional*, (1999),hlm.5. [↑](#footnote-ref-6)
7. 7 Theodore A Coloumbis dan James H Wolfe,*Pengantar Hubungan Internasional*(1990), hlm.312-313. [↑](#footnote-ref-7)
8. 8 Jack C. Plano dan Roy Olton, terjemahan Wawan Juanda, *Kamus Hubungan Internasional*(1999), hlm.281. [↑](#footnote-ref-8)
9. 9 Leonard, L.L, *International Organization*(1951), hlm.5. [↑](#footnote-ref-9)
10. 10 Jack C. Plano dan Roy Olton,terjemahan Wawan Juanda,*Kamus Hubungan Internasional*(1999),hlm.299. [↑](#footnote-ref-10)
11. 11 Jack C Plano,KamusAnalisa Politik (1982) [↑](#footnote-ref-11)
12. 12 Dahlan Nasution, *Politik Internasional*(1991),hlm.53. [↑](#footnote-ref-12)
13. 13 K.J.Holsty,Politik Internasional sebagai suatu Kerangka Analisis (1987),hlm.592. [↑](#footnote-ref-13)
14. 14 Dahlan Nasution,Politik Internasional (1981),hlm.153. [↑](#footnote-ref-14)
15. 15 “Bentrokan India-Pakistan”, Harian Kompas, Jakarta 18 Januari 2000.hlm.III. [↑](#footnote-ref-15)
16. 16 “Konflik Kashmir Terus Berlanjut”, Harian Kompas, Jakarta 23 April 2001. hlm.II. [↑](#footnote-ref-16)
17. 17 Hery Sucipto,Marrio E Carranza**,** “*Benang Kusut Kashmir* ”, Harian Kompas, Jakarta 15 Mei 2001. hlm.VI. [↑](#footnote-ref-17)
18. 18 Ilham Gunawan,” *Kamus Politik* *Internasional”*, 1983, hlm.132. [↑](#footnote-ref-18)
19. 19 Charles P. Schleicher,” teori *preponderant power”*, 1968,hlm.34. [↑](#footnote-ref-19)
20. 20 The Nuclear age Reader [↑](#footnote-ref-20)
21. 21 Dougherty dan Pfalzgraff, Edy Prasetyo,”Analisis CSIS”,No.5,1992,hlm.417. [↑](#footnote-ref-21)
22. 22 Jubaidi Pribadi,”*Kashmir dan Peran* PBB”,1999,hlm.58. [↑](#footnote-ref-22)
23. 23 Ibid., hlm.58. [↑](#footnote-ref-23)
24. 24 Simon Fisher, Jawed Ludin, Steve Williams, Deka Ibrahim Abdi, *Richard Smith*, Sue Williams,”*Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk bertindak”,*2000, hlm.9. [↑](#footnote-ref-24)